

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Afriko, Joni, 2014, *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya)*, In Media, Bogor.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta
- Bukit, Benjamin, dkk, 2017, *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*, Zahr Publishing, Gorontalo, hlm 20.
- Gultom, Maidin, 2008, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, PT Refika Aditama, Bandung
- Hayat, 2018, *Reformasi Kebijakan Publik Perpektif Makro dan Mikro*, Prenamedia Group, Malang, hlm 100
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Nawawi, H. Hadari, 1990, *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, Uneversity Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam Kerangka Hukum Kesehatan)*, Mandar Maju, Jakarta.
- Soenaryo,A, *Kamus Ilmiah Populer*, CV. Cahaya Agency, Surabaya.
- Suharsimi, Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- SW, Maria, *et al.*, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Taufi Ell Rahman, *et al.*, 2015, *Aktualisasi Hukum Kontemporer, Respons Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional*, Genta Press, Yogyakarta, hlm 3. Dalam: Nurhadi Susanto, *Refleksi Hukum Terhadap Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan*.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Right Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia, Jakarta

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pula-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.

Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 54 Tahun 2016

3. JURNAL

Abbas, Hafid, 2008, *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm 1. Dalam *Jurnal*: Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", hlm 1.

- Cut Sriyanti, 2016, *Mutu Layanan Kebidanan Dan Kebijakan Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm 41
- Ginting, Grenaldo, 2014, “Hak Paten Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia”, *Jurnal*, hlm 70.
- Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan Komite yang bertugas memantau penerapan Konvenan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh negara pihak melalui perspektif internasional yang beranggotakan 18 orang terdiri dari para ahli dengan kemampuan yang telah diakui dalam bidang hak aasi manusia. Anggota Komite adalah orang-orang yang independen dan mengabdikan berdasarkan kemampuannya masing-masing, bukan perwakilan dari pemerintahannya. Dalam: Rico Mardiansyah, 2018, “Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia”, *Jurnal*.
- Kurniawati Hapsari Ekosafitri, *etc all*, 2017, “Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara”, *Jurnal*, hlm 121.
- La Sajana, 2017, “Analisis Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Pesisir DI Wilayah Kerja Puskesmas Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat Tahun 2017”, *Jurnal*.
- Ode Mane, Malo, dkk 2018, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas (Studi di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara)”, *Jurnal*, Universitas Halu Oleo, hlm 326.
- Persatuan Perawat Indoneisa (PPNI), 2012, Standar Kompetensi Perawat Indonesia, Jakarta, hlm 11.
- Soetandyo Wignjosoebroto (2003), Hak-hak asasi manusia: Konsep dasar dan pengertiannya yang klasik pada masa awal perkembangannya dalam toleransi keragaman,. dalam: Rahyu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*”, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet.ii, 2012.hlm2.
- Suharmiati dkk, 2012, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan di Kabupaten Sambas”, *Jurnal*.
- Sujamto, Noerdin Ahmad Sumarno, 1997, “Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,” Rineka Cipta.

4. MAKALAH, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

- Eka Yuniza, Mailinda, 2016, Arah Kebijakan Pengaturan Bidang Kesehatan Pada Era Otonomi Luas, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada.
- Malimpa, Riski 2018, Analisis Determinan Akses Pelayanan Kesehatan Pada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Magelang. *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.
- Ovilia, Muchtar, Syamsuddin & Azisa, Nur, 2017, Skripsi :*pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA sungguminasa kabupaten gowa*, Fakultas Hukum UNHAS, pdf, www.unhas.ac.id, diakses tanggal 8 Maret 2019.
- Perwira, Indra, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, 2009, *Dimensi-dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, hlm. 138.
- Rina Anggrojati, 2009, “Dukun Bayi Dalam Persalinan Oleh Masyarakat Indonesia”, *Makara Kesehatan*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2009 hlm 9. Dalam: Rimawati, 2019, *Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Melalui Pranata Adat Dan Pranata Hukum Formil*, Yogyakarta, hlm 115.
- Teravosa, Gillan, 2015, Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Di Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Tesis*, Yogyakarta, hlm 1.

5. SUMBER INTERNET

- Badan Pusat Statistik Muna Barat.
- Kemenkes RI, 2015, *Rencana Straregi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*, Buku I, Jakarta
- Kemenkes RI, *Rencana Straregi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*, Jakarta, 2015
- Kementerian PPN/Bappenas, 2017, *Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas*.

- Kementrian PPN/Bappenas, *Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas*, 2017
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*.
- Notoatmodjo, S. 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*, Jakarta:Rineka
- Rhona K.M. Smith, *:Hak Asasi Manusia*”, PUSHAM-Pusat Studi Hak Asasi Manusia_ Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2008, hlm 28.
- Rhona K.M. Smith, 2008, *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Rif’atul Hidayat, *Hak Atas Derajat Kesehatan Yang Optimal*. 2016. Diakses pada tanggal 8 April 2019
- Sarcill, LM dan Mulyadi, 2018, butonrayanews.co.id/index.php/daerah/munaraaya/muna-barat/item1997-dinkes-mubr-tekankan-kesehatan-keluarga, diakses pada tanggal 16 April 2019
- Sarwono, 2004, *Sosiologi Kesehatan: Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*, Gadjah Madha University Pers, Jakarta
- Siswoyo, M, *Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum*, Semarang, hlm 1-2. Diakses pada tanggal 8 April 2019
- Soetandyo Wignjosebroto, 2003, *Hak-hak asasi manusia : Konsep dasar dan pengertiannya yang klasik pada masa awal perkembangannya dalam toleransi keragaman*, dalam :Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*”, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet.ii, 2012.hlm2.
- Suharmiati dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan di abupaten Sambas*, 2012.Diakses pada tanggal 13 Januari 2019.
- Sumarna, Almarogi, 2015, “Pengertian Sehat dan Sakit Menurut Para Ahli WHO” *Artikel*, <http://www.infosehat.id/pengertian> sehat menurut para ahli. Dalam: *Tesis : Claudia Dewi, 2015, "Peranan Komunikasi Efektif Antara Dokter Dan Pasien Sebagai Upaya Pencegahan Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan*, Universitas Gadjah Madah, Yogyakarta.
- Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan dengan 169 capaian terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.



**PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT DESA SANTIRI
KECAMATAN TIWORO UTARA KABUPATEN
MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
MUHAMAD SYUKRI, Dr. HENDRY JULIAN NOOR, S. H., M. Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Virgina A. Leary, *The Right to Health in International Human Right Law, Health and Human Right*, Vol. 1 No. 1, *The President and Fellows of Harvard College*